

Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis is licensed under
A [Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License](#).

Reformulasi Kebijakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Era Digital: Pendekatan Kualitatif Berbasis Studi Literatur dan Benchmarking Global

Yohanes Gala Araftake Blikololong¹⁾, Legawa Tegar Ramadhan^{2)*}, Syska Gloria³⁾, Kasnur Saputra⁴⁾, Sutarto⁵⁾

Institut Sains dan Bisnis Internasional, Singkawang, Indonesia

¹⁾E-mail: yohanes.gala93@gmail.com

²⁾E-mail: legawategar.isbisingkawang@gmail.com

³⁾E-mail: sygloria.isbimbi@gmail.com

⁴⁾E-mail: kasnursaputra@gmail.com

⁵⁾E-mail: florensiussutarto@gmail.com

*Corresponding Author

Article Information:

Received 07 06, 2026

Revised 07 27, 2026

Accepted 08 06, 2026

Keywords: Bank Perekonomian Rakyat, Transformasi digital, Kebijakan Keuangan Mikro, Tata Kelola, Inklusi Keuangan, Fintech, Regulasi Adaptif

© **Copyright:** 2026. Authors retain copyright and grant the JTMB (Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis) right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution License](#)

Abstract

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan pelaku UMKM yang belum terlayani perbankan konvensional. Namun, perkembangan teknologi keuangan, munculnya fintech dan neobank, serta perubahan regulasi yang semakin kompleks menuntut BPR untuk beradaptasi agar tetap berdaya saing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur untuk merumuskan kerangka kebijakan yang mendukung keberlanjutan BPR di era digital. Analisis difokuskan pada lima aspek utama, yaitu transformasi digital, reformasi regulasi dan insentif, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, kolaborasi dengan ekosistem keuangan mikro, serta dukungan pemerintah dan OJK. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan BPR memerlukan sinergi lintas sektor, kebijakan publik yang mendukung inklusi keuangan, dan penguatan kelembagaan berbasis teknologi serta data. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan roadmap nasional yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat peran BPR dalam pemberdayaan ekonomi lokal

How to cite:

Araftakeblikololong, Y., Gloria, S., Ramadhan, L., Saputra, K., & Sutarto, S. (2026). Reformulasi Kebijakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Era Digital: Pendekatan Kualitatif Berbasis Studi Literatur dan Benchmarking Global. JURNAL TERAPAN MANAJEMEN DAN BISNIS, 12(2). doi:<http://dx.doi.org/10.26737/jtmb.v12i2.9510>

INTRODUCTION

Industri keuangan mikro merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat perekonomian nasional, khususnya melalui penyediaan akses layanan keuangan formal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu institusi yang berperan penting dalam

sistem keuangan mikro di Indonesia adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang berfungsi memperluas akses pembiayaan masyarakat di wilayah yang belum terjangkau bank umum sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pembiayaan sektor produktif.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Perkreditan Rakyat berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara langsung. Kehadiran BPR berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah.

Meskipun memiliki peran yang strategis, perkembangan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menunjukkan tantangan yang semakin kompleks. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut

Table. 1 Perkembangan Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia

Tahun	Jumlah BPR
2021	1.468
2022	1.441
2023	1.402
2024	1.356
Juni 2025	1.339

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menurun dari 1.468 unit pada tahun 2021 menjadi 1.339 unit pada Juni 2025. Penurunan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tersebut mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi industri BPR, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, termasuk perubahan regulasi, konsolidasi industri, keterbatasan permodalan, serta perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar penguatan aspek permodalan atau tata kelola.

Selain menghadapi tekanan eksternal akibat transformasi digital, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) juga menghadapi berbagai tantangan internal yang berkaitan dengan kesehatan kelembagaan dan pengelolaan risiko. Napitupulu dan Puspitasari (2023) menunjukkan bahwa kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), risiko kredit (*Non-Performing Loan*), likuiditas (*Loan to Deposit Ratio*), efisiensi operasional (*BOPO*), dan tata kelola merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola risiko serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Di sisi lain, perkembangan *financial technology (fintech)*, bank digital, perubahan perilaku nasabah, serta dinamika regulasi sektor jasa keuangan telah mengubah lanskap industri perbankan secara signifikan. Transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi informasi, tetapi juga

mencakup perubahan model bisnis, tata kelola perusahaan, penguatan manajemen risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dituntut untuk melakukan transformasi secara menyeluruh agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi lembaga keuangan mikro tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi digital, tetapi juga oleh kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. India dan Filipina, misalnya, berhasil memperkuat lembaga keuangan mikro melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, serta sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan memerlukan kebijakan yang terintegrasi sehingga mampu menjawab tantangan perubahan teknologi dan meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Temuan tersebut memberikan dasar konseptual bahwa transformasi BPR memerlukan pendekatan kebijakan yang bersifat adaptif dan terintegrasi. Perspektif inilah yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka reformulasi kebijakan pada penelitian ini.

Berbagai penelitian telah mengkaji pengembangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari berbagai perspektif. Jaya (2020) menekankan bahwa tantangan utama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terletak pada penguatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika ekonomi makro. Berbeda dengan itu, Napitupulu dan Puspitasari (2023) lebih berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab potensi kebangkrutan BPR melalui analisis kesehatan bank. Selanjutnya, Kumara dan Suryanata (2023) mengkaji kolaborasi antara BPR dan perusahaan fintech sebagai strategi meningkatkan daya saing, sedangkan Malihah dkk. (2024) menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, dan dukungan regulasi dalam memperluas inklusi keuangan. Sementara itu, Hutasoit (2026) menawarkan arah transformasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melalui integrasi digital, tata kelola inklusif, dan konsep green banking. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih mengkaji aspek-aspek tersebut secara parsial sehingga belum menghasilkan suatu kerangka kebijakan yang mengintegrasikan berbagai dimensi strategis dalam mendukung transformasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di era digital.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih dilakukan secara parsial. Sebagian penelitian berfokus pada aspek kesehatan dan profitabilitas bank, sebagian lainnya menitikberatkan pada digitalisasi layanan, tata kelola, maupun kolaborasi dengan perusahaan fintech. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengintegrasikan transformasi digital, reformasi regulasi, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, kolaborasi ekosistem keuangan mikro, serta pembelajaran dari praktik internasional ke dalam satu kerangka reformulasi kebijakan yang komprehensif bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia. Padahal, tantangan yang dihadapi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bersifat multidimensional sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu kerangka reformulasi kebijakan adaptif Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang mengintegrasikan lima dimensi strategis, yaitu transformasi digital, reformasi regulasi, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, kolaborasi ekosistem keuangan mikro, serta dukungan pemerintah dan regulator. Kerangka tersebut disusun melalui sintesis literatur dan *benchmarking* terhadap praktik pengembangan lembaga keuangan mikro di negara

berkembang sehingga menghasilkan model kebijakan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa penyusunan kerangka reformulasi kebijakan adaptif yang memperkaya pengembangan konsep reformulasi kebijakan pada lembaga keuangan mikro di era digital. Secara praktis, kerangka tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, OJK, dan pengelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam merumuskan strategi transformasi kelembagaan yang adaptif, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual sekaligus kebijakan bagi pengembangan sektor keuangan mikro di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menyusun kerangka reformulasi kebijakan adaptif Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di era digital melalui pendekatan studi literatur dan benchmarking internasional. Kerangka tersebut diharapkan menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan BPR yang lebih adaptif terhadap transformasi digital serta mendukung peningkatan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk merumuskan kerangka reformulasi kebijakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan interpretasi secara mendalam terhadap berbagai literatur, regulasi, dan dokumen kebijakan guna memahami tantangan transformasi BPR serta mengidentifikasi strategi kebijakan yang relevan. Pendekatan ini sesuai digunakan dalam penelitian konseptual yang bertujuan menyusun sintesis kebijakan berdasarkan berbagai sumber ilmiah sebagai dasar dalam merumuskan kerangka reformulasi kebijakan yang komprehensif.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan, dokumen strategi nasional, serta publikasi lembaga internasional yang berkaitan dengan transformasi digital, tata kelola, regulasi sektor keuangan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro. Literatur dipilih berdasarkan tingkat relevansi dengan tujuan penelitian, keterbaruan publikasi, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan transformasi digital, tata kelola, regulasi sektor keuangan, dan pengembangan kebijakan Bank Perekonomian Rakyat di era digital.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui empat tahapan, yaitu mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul dalam literatur, mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema yang memiliki keterkaitan, membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan kebijakan yang berlaku, dan melakukan sintesis untuk merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif. Proses analisis difokuskan pada lima dimensi utama, yaitu transformasi digital, reformasi regulasi, tata kelola dan manajemen risiko, kolaborasi ekosistem keuangan mikro, serta dukungan pemerintah dan regulator.

Untuk memperkuat hasil analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan *policy benchmarking* dengan membandingkan kebijakan pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia dengan kebijakan sejenis di negara berkembang seperti India dan Filipina. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki karakteristik sebagai negara berkembang yang berhasil memperkuat sektor keuangan mikro melalui digitalisasi layanan, dukungan regulasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Tahap akhir penelitian adalah melakukan sintesis terhadap hasil *content analysis* dan *policy benchmarking* untuk menyusun kerangka reformulasi kebijakan adaptif Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di era digital. Kerangka tersebut dibangun melalui integrasi lima dimensi strategis yang diperoleh dari hasil sintesis literatur sehingga menghasilkan suatu kerangka reformulasi kebijakan adaptif yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia. Melalui tahapan penelitian tersebut diharapkan diperoleh suatu kerangka reformulasi kebijakan adaptif Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di era digital yang dapat menjadi dasar konseptual dalam pengembangan kebijakan sektor keuangan mikro. Kerangka tersebut juga diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pengelola BPR dalam merumuskan strategi transformasi kelembagaan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

RESULT AND DISCUSSION

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas ekonomi kecil yang belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional. Kasmir (2016) menekankan bahwa BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang dirancang untuk menjangkau segmen masyarakat unbankable melalui penyediaan layanan tabungan dan kredit berskala kecil. Peran ini semakin penting mengingat kontribusi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terhadap pendalaman sistem keuangan lokal yang menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan. Meski secara nasional kontribusi aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih di bawah 2% dari total industri perbankan, kehadirannya sangat signifikan di daerah-daerah yang belum terlayani oleh bank umum (OJK, 2022).

Namun demikian, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) juga menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat kemampuannya dalam merespons dinamika industri keuangan modern. Nasution dan Indrajit (2020) mengidentifikasi berbagai kelemahan internal, seperti rendahnya kualitas tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia, dan dominasi model bisnis tradisional berbasis bunga yang belum mampu bersaing dengan entitas keuangan berbasis teknologi. Bank Indonesia (2021) mencatat bahwa hanya sebagian kecil Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah menggunakan sistem teknologi informasi terintegrasi, dan mayoritas belum memanfaatkan layanan digital seperti internet banking atau aplikasi mobile. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih beroperasi secara konvensional, yang membuat mereka rentan terhadap disrupsi teknologi.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, transformasi digital menjadi elemen kunci bagi keberlangsungan institusi keuangan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Menurut Schindler (2017), digitalisasi tidak hanya menyangkut adopsi perangkat teknologi, melainkan juga perubahan struktur organisasi, strategi layanan nasabah, dan proses internal yang berbasis data. Dalam konteks regulasi, pendekatan pengawasan yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar inovasi digital dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Black (2008) melalui konsep "adaptive regulation" mengusulkan perlunya kerangka hukum yang fleksibel, kolaboratif, dan terbuka terhadap eksperimen melalui sandbox regulasi serta integrasi sistem pelaporan digital. Dalam praktiknya, OJK mulai menerapkan model pengawasan berbasis risiko, namun implementasinya masih perlu diperluas dan diperkuat secara konsisten (OJK, 2023).

Di sisi lain, kolaborasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor pendukung yang tak kalah penting. Basri (2019) menyebutkan bahwa keberhasilan BPR sangat ditentukan oleh sejauh

mana lembaga tersebut mampu menjalin sinergi dengan entitas lokal seperti koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM. Kemitraan strategis ini dapat menghasilkan produk keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memperluas jangkauan layanan secara lebih efektif. Selanjutnya, World Bank (2020) menegaskan bahwa upaya inklusi keuangan yang berkelanjutan tidak cukup hanya dengan menyediakan akses ke produk keuangan, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan yang menciptakan pemahaman dan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi keuangan formal.

Lebih jauh, perkembangan kebijakan keuangan mikro secara global menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dan kolaboratif semakin menjadi tren utama. Negara-negara seperti India dan Filipina telah berhasil mendorong transformasi digital pada lembaga keuangan mikro melalui regulasi yang pro-inovasi dan kemitraan strategis lintas sektor. Dalam konteks ini, Bank Indonesia (2022) mendorong pentingnya integrasi teknologi sebagai faktor penentu daya saing industri BPR. Oleh karena itu, strategi penguatan BPR di Indonesia harus disusun secara holistik, mencakup dimensi regulasi, tata kelola, literasi keuangan, teknologi, dan kapasitas institusional secara berimbang.

Pembahasan dalam artikel ini disusun berdasarkan lima pilar utama kebijakan strategis yang diperlukan untuk memperkuat keberadaan BPR sebagai lembaga keuangan mikro yang adaptif dan relevan. Kelima pilar tersebut dikembangkan dari hasil studi literatur, pengalaman empirik, serta analisis kebijakan di sektor keuangan mikro dalam konteks Indonesia.

1. Transformasi Digital dan Teknologi Inklusif

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Untuk tetap kompetitif, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) perlu segera melakukan digitalisasi menyeluruh, baik dalam aspek layanan kepada nasabah maupun dalam sistem operasional internal. Digitalisasi tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan model bisnis, peningkatan efisiensi, serta perluasan jangkauan layanan.

Adopsi teknologi seperti core banking system, mobile banking, hingga penggunaan artificial intelligence dalam analisis risiko kredit akan mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing. Namun, digitalisasi ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan keterbatasan infrastruktur yang dihadapi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terutama di wilayah rural. Oleh karena itu, pendekatan teknologi yang inklusif — seperti pengembangan aplikasi ringan berbasis Android atau penyediaan layanan keuangan melalui agen menjadi solusi yang realistis dan berdampak besar.

2. Reformasi Regulasi dan Kebijakan Insentif

Sistem regulasi yang terlalu ketat justru dapat membatasi ruang gerak inovasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Regulasi semestinya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan ruang inovasi.

Salah satu bentuk reformasi adalah penyederhanaan proses perizinan kerja sama antara BPR dan fintech, serta pemberian insentif fiskal seperti keringanan pajak atau subsidi pelatihan digital. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa salah satu kendala besar dalam pemasaran produk kredit Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah tahapan yang terlalu birokratis dan suku bunga yang kurang bersaing. Kebijakan afirmatif diperlukan agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat bersaing dengan koperasi dan credit union yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Stabilitas internal merupakan fondasi bagi keberlanjutan institusi keuangan. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kelemahan pengawasan internal, ketidakterpisahan antara pemilik dan manajemen, serta keterbatasan sistem pelaporan menjadi hambatan serius dalam pengembangan kelembagaan.

Penerapan sistem manajemen risiko berbasis data, seperti credit scoring dan monitoring real-time transaksi, harus menjadi prioritas. Selain itu, pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip manajemen risiko dan etika bisnis juga harus menjadi bagian dari strategi pembenahan internal.

4. Kolaborasi Ekosistem Keuangan Mikro

Dalam menghadapi tantangan modern, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama dalam membangun ekosistem keuangan mikro yang kuat dan berdaya tahan. Sinergi dengan BUMDes, koperasi, fintech lokal, dan UMKM akan memperluas jaringan dan memperdalam inklusi keuangan berbasis komunitas.

Kolaborasi ini juga menciptakan peluang untuk pengembangan produk keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan penyedia data UMKM, sementara OJK dapat berperan sebagai enabler melalui sandbox regulasi dan fasilitasi inkubasi produk.

5. Peran Strategis Pemerintah dan Regulator

Pemerintah dan OJK memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keberlanjutan dan daya saing BPR. Dukungan kebijakan tidak hanya berupa pengawasan, tetapi juga fasilitasi inovasi dan penguatan kelembagaan. Misalnya, penyediaan platform pelatihan SDM, subsidi untuk digitalisasi, dan pembukaan akses terhadap teknologi cloud yang aman dan terjangkau.

Lebih jauh, pemerintah juga dapat mengarahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR), agar dana publik benar-benar menjangkau pelaku usaha mikro yang menjadi target inklusi keuangan. Dengan peran aktif regulator dan negara, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat bertransformasi menjadi lembaga keuangan rakyat yang adaptif, berdaya saing, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil.

Kerangka reformulasi kebijakan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat parsial. Transformasi digital, reformasi regulasi, penguatan tata kelola, kolaborasi ekosistem, dan dukungan pemerintah merupakan lima dimensi yang saling berinteraksi dalam membentuk kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan industri keuangan digital.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai pengembangan lembaga keuangan mikro dengan mengintegrasikan berbagai perspektif yang sebelumnya dibahas secara terpisah ke dalam satu kerangka konseptual. Secara praktis, kerangka ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pengelola BPR dalam merumuskan strategi transformasi kelembagaan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

CONCLUSIONS

Transformasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan keniscayaan di tengah tantangan digitalisasi, tekanan regulasi, dan meningkatnya persaingan dari institusi keuangan berbasis teknologi. Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis kebijakan, terdapat lima pilar strategis yang menjadi kunci dalam memperkuat relevansi dan keberlanjutan BPR di era keuangan digital. **Pertama**, transformasi digital menjadi fondasi utama untuk mendorong efisiensi, memperluas akses layanan, dan meningkatkan daya saing. Digitalisasi tidak hanya menyangkut adopsi teknologi, tetapi juga perubahan model bisnis, sistem operasional, dan pola pelayanan nasabah yang berbasis inklusi. **Kedua**, reformasi regulasi dan kebijakan insentif perlu segera dilakukan untuk menghapus hambatan struktural yang menghalangi inovasi. Regulasi yang terlalu kaku harus digantikan dengan pendekatan yang adaptif, termasuk kemudahan kerja sama antara BPR dan fintech, sandbox regulasi, serta insentif fiskal bagi institusi yang berkomitmen terhadap digitalisasi. **Ketiga**, penguatan tata kelola dan manajemen risiko merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga kesehatan lembaga. Implementasi prinsip *Good Corporate Governance*, pelatihan sumber daya manusia, serta penggunaan sistem pelaporan dan credit scoring berbasis teknologi harus menjadi prioritas. **Keempat**, kolaborasi dalam ekosistem keuangan mikro merupakan strategi utama untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat relevansi sosial BPR. Kemitraan dengan UMKM, koperasi, BUMDes, hingga penyedia teknologi lokal akan memperkuat posisi BPR sebagai mitra pembangunan ekonomi komunitas. **Kelima**, peran aktif pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dioptimalkan melalui kebijakan afirmatif, subsidi digitalisasi, serta penyediaan pelatihan dan dukungan infrastruktur regulasi. Tanpa dukungan negara, transformasi BPR berisiko terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusi dan ketimpangan digital.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan BPR sangat bergantung pada kemampuan bertransformasi secara menyeluruh dan kolaboratif. Diperlukan *roadmap nasional* yang integratif, responsif, dan berpihak pada masyarakat kecil agar BPR dapat terus memainkan peran strategis dalam membangun inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan, referensi, serta dukungan intelektual sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba lainnya.

CONFLICTS OF INTEREST STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, yang dapat mempengaruhi objektivitas, proses penyusunan, analisis, maupun publikasi artikel ini.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Penulis pertama berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, dan peninjauan naskah. Penulis kedua bertanggung jawab terhadap perumusan ide penelitian, pengumpulan dan analisis literatur, penyusunan naskahh utama serta penyuntingan akhir. Penulis ketiga berkontribusi

pada analisis kebijakan, interpretasi hasil kajian, dan validasi substansi artikel. Penulis ke empat berperan dalam pengembangan pembahasan, penyusunan rekomendasi kebijakan, telaah kritis terhadap naskahh. Dan penulis kelima berkontribusi pada supervisi penelitian, evaluasi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskahh yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis telah membaca, menyetujui dan bertanggung jawab atas isi artikel.

REFERENCES

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* Georgetown Journal of International Law, 47(4), 1271–1319.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Survei Nasional Inklusi Keuangan Tahun 2021*. Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2022). *Roadmap Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi Digital di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basri, F. (2019). *Tata Kelola Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Antara Regulasi dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Black, J. (2008). *Forms and Paradoxes of Principles-Based Regulation*. Capital Markets Law Journal, 3(4), 425–457. <https://doi.org/10.1093/cmlj/kmn026>
- Carstens, A. (2021). *Central banking and innovation: partners in the quest for financial inclusion*. BIS Bulletin No. 42. Bank for International Settlements.
- Chen, G., Rasmussen, S., & Reille, X. (2010). *Growth and Vulnerabilities in Microfinance*. CGAP Focus Note No. 61. Washington, DC: CGAP.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Hutasoit, P. S. J. K. (2026). Transformasi Strategis Industri BPR melalui Integrasi Digital, Tata Kelola Inklusif, dan Green Banking. *Fundamental Management Journal*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.33541/fjm.v11i1.8023>
- Jaya, I. G. N. A. A. (2020). Peran dan tantangan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) saat ini. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/kpmc2r46>
- Kasmir. (2016). *Manajemen Perbankan* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kumara, N. R., & Suryanata, I. G. N. P. (2023). Strategi BPR dalam menghadapi gempuran fintech. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, 12(1), 46–52. <https://doi.org/10.29303/jmm.v12i1.744>
- Lauer, K., & Lyman, T. (2015). *Digital Financial Inclusion: Implications for Customers, Regulators, Supervisors, and Standard-Setting Bodies*. CGAP Brief. Washington, DC: World Bank.
- Malihah, S., Sundhusiah, A., Ramadani, A., & Astuti, R. P. (2024). Analisis Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 313–319. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.767>
- Napitupulu, S., & Puspitasari, D. M. (2023). Model Prediksi Kebangkrutan Bank Perkeonomian Rakyat di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(3), 130–146. <https://doi.org/10.23969/jrie.v3i3.69>
- Nasution, D., & Indrajit, R. E. (2020). *Transformasi Keuangan Mikro di Era Digital*. Jakarta: LP3ES.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Statistik Perbankan Indonesia 2022*. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Tahunan OJK 2023: Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Bank Perekonomian Rakyat*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. Statistik Perbankan Indonesia Juni 2025. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). *Financial Inclusion and Development*. Journal of International Development, 23(5), 613–628. <https://doi.org/10.1002/jid.1698>
- Schindler, J. W. (2017). *FinTech and Financial Transformation: The Rise of Tech-Driven Financial Intermediaries*. IMF Working Paper No. 17/60. International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.5089/9781475582340.001>
- Setyowati, L. (2022). Digitalisasi BPR: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Digital dan Inovasi*, 4(1), 15–28.
- World Bank. (2020). *Global Findex Database 2020: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
<https://globalfindex.worldbank.org/>
- Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. New York: PublicAffairs.